

RENCANA KERJA 2026 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

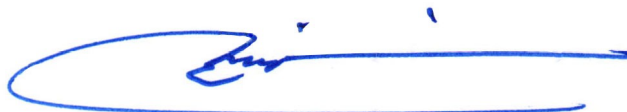
Shalawat beserta salam juga kita haturkan ke haribaan Nabi junjungan alam Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan RENJA SKPA tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatan indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun berjalan. Setiap Renja SKPA akan memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Penyusunan Renja ini diharapkan dapat bersinergis dengan perencanaan pembangunan tahunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan sasaran serta target RPA Tahun 2023-2026 dengan Rencana Strategis SKPA. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2026 ini diharapkan efektivitas dan efisiensi kerja dapat lebih optimal dalam rangka mendukung program pemerintahan dan pembangunan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran, dukungan dan kerjasama dalam mendukung kelancaran Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh ini. Kami juga sangat mengharapkan saran, masukan dan kritikan yang bersifat konstruktif terhadap materi Rencana Kerja ini, sehingga penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran berikutnya menjadi lebih baik.

Demikian harapan kami semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya untuk proses perkembangan selanjutnya.

Banda Aceh, Februari 2025
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



Dr. EDI YANDRA, S.STP, M.SP

Pembina Utama Madya
NIP : 19751105 199612 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi.....	ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	
	Tahun Lalu dan Mempedomani Renstra SKPA 2023-2026	4
2.1.1.	Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak	
	Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan	6
2.1.2.	Realisasi Program/Kegiatan yang	
	Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan	6
2.1.3.	Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi	
	Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan	9
2.1.4.	Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tidak	
	Tercapainya/Terpenuhinya Target Kinerja Program/Kegiatan	9
2.1.5.	Implikasi yang Timbul Terhadap	
	Target Capaian Program Renstra SKPD	10
2.1.6.	Kebijakan/Tindakan Perencanaan Penganggaran yang Perlu	
	Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut	11
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Aceh.....	13
2.2.1.	Jenis Layanan Perpustakaan dan Kearsipan	14
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
2.3.1.	Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam	
	Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
2.3.2.	Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan	
	Perangkat Daerah	19
2.3.3.	Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan	

Penting untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan	
Prioritas pada Tahun yang Direncanakan	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPA	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT ACEH	22
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	22
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	22
3.3 Program dan Kegiatan	22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	27
4.1 Program dan Kegiatan	27
BAB V PENUTUP	31
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) telah menjadi prioritas utama yang akan dijadikan pedoman dalam merumuskan, mengevaluasi, dan mengimplementasikan setiap kebijakan pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah sebaiknya memperhatikan kebutuhan, harapan serta tuntutan publik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung penerapan prinsip-prinsip Good Governance Pemerintah menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagai bukti komitmen dan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip ini.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Aceh Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Aceh untuk periode 1 (satu) tahun dimana keberadaan dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) serta Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Aceh. Renja merupakan kesatuan dokumen perencanaan pembangunan. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Pasal 273 Ayat (2) menyebutkan "Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD". Lebih lanjut Pasal 273 Ayat (3) menyebutkan "Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah".

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sebagai salah satu perangkat Pemerintah Aceh memiliki kewajiban untuk menyusun Renja sesuai dengan peran dan kewenangannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu penyelenggaraan urusan Perpustakaan dan Kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh menjalankan tugas pokok dan fungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dan penyelamatan arsip sebagai identitas jati diri

bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh mengemban tugas urusan pemerintahan dan pembangunan yaitu penyelenggaraan urusan kearsipan sebagai memori pertanggungjawaban Nasional dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta urusan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 29 yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Untuk Periode 1 (Satu) Tahun;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
5. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026.
6. Peraturan Gubernur Aceh No.1 Tahun 2024 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka disusunlah Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2026 yang merupakan perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Renja disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra). Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja adalah sebagai berikut:

- 1) Dokumen Renja sebagai kerangka acuan dalam penyelenggaraan Tugas Pokok Fungsi instansi untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- 2) Sebagai panduan operasional pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra
- 3) Memudahkan dalam pengukuran efisiensi dan efektivitas kinerja
- 4) Memudahkan pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelayanan instansi pemerintah
- 5) Sebagai pedoman bagi instansi dalam mewujudkan visi misi.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Rencana kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2026 terdiri dari V (lima) bab yaitu : Bab I Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Aceh Tahun Lalu yang terdiri dari : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Aceh Tahun Lalu dan Mempedomani Renstra SKPA 2023-2026; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Aceh; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; RKPA. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang terdiri dari: Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan Sasaran Perangkat Aceh; Program dan Kegiatan. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah. Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Mempedomani Renstra SKPA 2023-2026

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 50.633.745.328- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp.49.648.894.387,- atau 98,05 % dari pagu anggaran. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh pada tahun 2024 mengelola anggaran operasional sebesar Rp. 31.720.052.886,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.777.234.755,- yang terdiri dari Belanja pegawai sebesar Rp. 17.599.221.532,- dengan realisasi Rp. 16.834.072.736,- dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 13.536.263.354,- dengan realisasi Rp. 13.423.634.019,-.

Alokasi anggaran untuk Belanja modal Rp. 18.913.692.442,- dengan realisasi Rp. 18.871.659.632,-. Alokasi anggaran untuk Belanja Modal terdiri dari Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 7.519.152.442,- dengan realisasi Rp. 7.497.844.882,-, belanja modal Gedung dan bangunan Rp. 445.340.000,- dengan realisasi Rp. 444.911.000,-. Sedangkan belanja modal asset tetap lainnya Rp. 10.949.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.928.903.750,-.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2024 ditentukan dari hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBA Provinsi Aceh. Adapun realisasi anggaran per 31 Desember 2024 sebagaimana pada tabel 1 dibawah ini:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
	Belanja Daerah	50.633.745.328	49.648.894.387	98,05
1.	-Belanja Operasional	31.720.052.886	30.777.234.755	97,03
	- Belanja Pegawai	18.183.789.532	17.353.600.736	95,43
	- Belanja barang&jasa	13.536.263.354	13.423.634.019	99,17
2.	Belanja Modal	18.913.692.442	18.871.659.632	99,78
	-Belanja modal peralatan&mesin	7.519.152.442	7.497.844.882	99,72
	-Belanja Modal Gedung&bangunan	445.340.000	444.911.000	99,90

-Belanja Modal Asset Tetap lainnya	10.949.200.000	10.928.903.750	99,81
------------------------------------	----------------	----------------	-------

Alokasi anggaran program dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh T.A 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan rutin Dinas yang membiayai 1 program, 6 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp. 34.889.769.765,-
2. Program dan Kegiatan urusan Perpustakaan yang membiayai 1 program dengan 2 kegiatan dan 12 Sub Kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp. 13.626.809.133,-
3. Program dan Kegiatan urusan Kearsipan yang membiayai 3 program dengan 7 kegiatan dan 10 sub kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp. 1.132.315.489,-

Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran per program TA. 2024 dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	% Capaian Keuangan
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	35.845.616.406	34.889.769.765	97,33
2	Pembinaan Perpustakaan	13.652.106.146	13.626.809.133	99,81
3	Pengelolaan Arsip	696.017.884	694.099.340	99,72
4	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	292.654.804	290.891.049	99,40
5	Perizinan Menggunakan Arsip	147.350.088	147.325.100	99,98
TOTAL		50.633.745.328	49.648.894.387	98,05

Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2024 dan berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil capaian keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar 98,05 %. Dengan capaian tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh dapat dikategorikan sebagai instansi

yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya. Beberapa evaluasi realisasi program/kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik (*feed back*) dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

Pada tahun 2024 ini terdapat 2 kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang tidak memenuhi target kinerja ($\leq 96,92\%$) sebagaimana telah direncanakan yaitu:

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN (95,65 %)
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi (94,19 %)

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dari 5 Program, 14 Kegiatan dan 40 Sub kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh pada tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang telah direncanakan sebanyak 5 Program, 13 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan sebagaimana pada tabel 3 dibawah ini:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
	TOTAL BELANJA	50.633.745.328	49.648.894.387	98,05	96.90
	Belanja Operasional	31.720.052.886-	30.777.234.755	97,03	100
	BELANJA LANGSUNG				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	35.845.616.406	34.889.769.765	97,03	
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	550.784.330	549.910.504	99.84	

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	450.296.617	449.457.404	99,81	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.487.713	400.453.100	99,97	
b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	249.534.824	244.234.560	97,88	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	81.767.000	77.019.160	94,19	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	86.711.629	86.600.900	99,87	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	81.056.195	80.614.500	99,46	
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.588.492.697	8.566.877.091	99,75	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90.173.922	90.145.000	99,97	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.528.152.442	7.506.744.882	99,72	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	403.865.333	403.739.700	99,97	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	185.293.500	185.287.509	99,99	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	111.360.500	111.313.000	99,96	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	269.647.000	269.647.000	100	
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.015.042.806	6.855.482.260	97,73	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000	49.990.000	99,98	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.614.053.738	1.560.236.876	96,67	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.350.989.068	5.245.255.384	98,02	
e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.842.540.217	1.839.192.614	99,82	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	929.440.000	927.499.024	99,79	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	415.140.000	414.530.000	99,85	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	497.960.217	497.163.590	99,84	
II	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	13.652.106.146	13.626.809.133	99,81	
a	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	12.764.382.638	12.740.799.533	99,82	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	501.591.920	501.518.999	99,99	
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	485.339.000	485.242.368	99,98	

	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	195.976.009	195.804.430	99,91	
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	38.209.000	38.140.000	99,82	
	Peningkatan kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	42.017.037	42.001.000	99,96	
	Pengembangan Perpustakaan Deposit	422.345.006	419.379.428	99,30	
	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	240.000.000	238.136.000	99,22	
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	10.822.327.666	10.804.011.308	99,83	
	Penyusun Data dan Informasi Perpustakaan	16.577.000	16.566.000	99,93	
b	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	887.723.508	886.009.600	99,81	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	323.546.000	323.296.000	99,92	
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	330.200.000	329.781.000	99,87	
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	116.969.500	116.830.100	99,88	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	117.008.008	116.102.500	99,23	
III	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	696.017.884	694.099.340	99,72	
a	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	486.486.710	484.658.890	99,62	
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	254.872.650	253.472.980	99,45	
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Prov.	85.436.000	85.398.960	99,96	
b	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	146.178.060	145.786.950	99,73	
	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	146.178.060	145.786.950	99,73	
c	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	209.531.174	209.440.450	99,96	
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	209.531.174	209.440.450	99,96	
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	292.654.804	290.891.049	99,40	
a	Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun	101.709.308	101.226.500	99,53	

	Penilaian, Penataan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	101.709.308	101.226.500	99,53	
b.	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemerkan Daerah Kab/Kota	150.833.556	150.268.049	99,63	
	Pendataan, penyusunan daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	84.758.556	84.195.722	99,34	
	Pendampingan penyelamatan arsip bagi Pemekaran Lintas Kab/ Kota	66.075.000	66.072.327	100	
b	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	40.111.940	39.396.500	98,22	
	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	40.111.940	39.396.500	98,22	
V	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	147.350.088	147.325.100	99,98	
a	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	147.350.088	147.325.100	99,98	
	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	147.350.088	147.325.100	99,98	

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (>100%) untuk tahun 2024 tidak ada.

2.1.4 Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya/terpenuhinya target kinerja program/kegiatan.

Faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah Kerangka Acuan Kerja/TOR pada setiap bidang yang menangani kegiatan masih belum optimal; data informasi yang tersedia baik di Kabupaten/Kota maupun Provinsi belum dikelola dengan baik; penyimpangan dari prosedur baku atau peraturan yang berlaku; dan kurang matangnya dalam penyusunan rencana kinerja sehingga target kinerja tidak dapat dicapai sesuai harapan. Koordinasi, konsultasi dan komunikasi diantara *stakeholders* terkait serta kemampuan memahami tugas masing-

masing juga berperan penting dalam keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD.

Program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan akan memberikan implikasi terhadap capaian program Renstra dan rencana pembangunan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Daerah baik perencanaan jangka Panjang maupun jangka menengah. Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) yang menjadi IndiKator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan layanan di bidang perpustakaan diharapkan memberikan implikasi yang positif bagi pencapaian target pembangunan daerah.

IPLM adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi atau kemampuan membaca dan menulis masyarakat di suatu tempat. Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dilakukan dengan menggunakan tujuh unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM), yaitu Pemerataan Layanan Perpustakaan; Ketercukupan Koleksi; Ketercukupan Tenaga Perpustakaan; Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari; Jumlah Perpustakaan yang dibina sesuai SNP; Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi; dan Jumlah Anggota Perpustakaan. TGM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur Indeks Gemar Membaca masyarakat secara tepat dan komprehensif. Hasil Kajian TGM ini dapat digunakan sebagai acuan dan panduan untuk merumuskan kebijakan di bidang perpustakaan.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Aceh tahun 2024 adalah 72,42 sedangkan tahun 2023 IPLM Aceh 66,23. IPLM Aceh tahun 2024 naik 6,19 point. IPLM Aceh tahun 2024 dan tahun 2023 walaupun naik 6,19 point tetapi nilai IPLM Aceh masih berada di bawah rata-rata Nasional.

Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Aceh Tahun 2024 adalah 69,93 Sedangkan tahun 2023 TGM Aceh 66,64. Nilai TGM Aceh meningkat 2,59 point. Nilai TGM Aceh juga masih berada di bawah rata-rata Nasional.

Implikasi yang diharapkan dalam penyelenggaraan layanan kearsipan adalah meningkatnya Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dan nilai pengawasan kearsipan internal. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam menentukan Indeks Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan di Pemerintah Daerah maupun Kementerian/Lembaga. Indeks ini dihitung berdasarkan hasil audit kearsipan yang selanjutnya akan digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan suatu lembaga dalam mengelola arsip dan dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan tata kelola kearsipan. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Aceh tahun 2023 dan tahun 2024 kategori BB (Sangat Baik). Masih diperlukan upaya-upaya yang lebih massif untuk meningkatkan kinerja di bidang penyelenggaraan kearsipan.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada Indikator sasaran yang telah ditetapkan.

1. Pembangunan Gedung Perpustakaan;

Dukungan gedung yang nyaman bagi pengunjung tentunya mampu menaikkan jumlah pengunjung yang akan berkunjung ke Perpustakaan yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Lanjutan pembangunan Gedung perpustakaan harus dapat diselesaikan tepat waktu karena akan memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan jumlah pengunjung. Tahun 2025 alokasi anggaran untuk lanjutan pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan sebesar Rp. 7.333.921.513,-, sedangkan tahun 2026 tidak ada lagi alokasi untuk pembangunan Gedung layanan perpustakaan.

2. Penyediaan bahan bacaan yang dibutuhkan oleh pemustaka;

Kelengkapan bahan bacaan di perpustakaan, tentu akan menarik minat masyarakat untuk berkunjung, yang akhirnya akan menghasilkan minat baca masyarakat dan mendorong peningkatan literasi di Aceh.

3. Peningkatan kapasitas pustakawan ;

Pelatihan serta Bimtek yang ditujukan untuk peningkatan *Capacity Building* Pustakawan harus terus ditingkatkan terutama pelatihan berbasis pelayanan digital. Tenaga Pustakawan sebagai pemberi layanan di garda terdepan kepada pemustaka harus dilatih cakap dan terampil dalam melayani dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka. Tenaga pustakawan juga harus diberikan pelatihan bagi penyelenggaraan layanan kepada kelompok rentan dan disabilitas. Pojok layanan disabilitas (disabilitas Corner) dengan tenaga pustakawan sejogjanya harus diupayakan dalam peningkatan kualitas layanan publik.

4. Penyelenggaraan Lomba

Penyelenggaraan Lomba dapat membantu dalam pengembangan keterampilan literasi para pemustaka. Mereka akan terdorong untuk membaca dan memahami teks lebih baik. Dengan lomba diharapkan juga dapat menumbuhkan apresiasi dan kecintaan pemustaka kepada buku dan bahan bacaan.

5. Pengelolaan Data dan Informasi

Data dan informasi berguna untuk mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan. Data dan informasi yang tersedia akan membantu dalam perencanaan jangka Panjang, perumusan strategi serta menyusun standar dan prosedur tertentu.

6. Bimbingan tertib Arsip SKPA;

Bimbingan Teknis, pembinaan dan pelatihan terhadap arsiparis di lingkup SKPA dan Lembaga perlu terus dilakukan dalam rangka mewujudkan tertib arsip di SKPA dan Lembaga yang ada di Provinsi Aceh.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Aceh

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang perpustakaan dan kearsipan pasal 12 ayat 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai

tugas Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Perumusan kebijaksanaan teknis program perpustakaan dan kearsipan;
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan;
5. Pengelolaan/pengolahan bahan pustaka dan arsip/dokumentasi;
6. Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan berbasis Teknologi Informasi;
7. Penyelenggaraan deposit dan pelestarian citra daerah serta khasanah arsip;
8. Penyelenggaraan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
9. Pengembangan kelompok jabatan fungsional di bidang perpustakaan dan kearsipan;
10. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Keliling dan Lapas.

Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat **norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK)** untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian **untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.**

Beberapa indikator sasaran yang menjadi tolok ukur keberhasilan Pemerintah Provinsi di bidang Perpustakaan di dalam mewujudkan target-target yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagaimana tertuang di dalam Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh adalah peningkatan jumlah koleksi bahan bacaan, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM perpustakaan, peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan, dokumen/ arsip daerah yang diselamatkan dan

dilestarikan, terwujudnya kualitas dan kuantitas SDM Kearsipan, dan peningkatan sarana/ prasarana kearsipan.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah. SPM merupakan tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, baik masukan, proses, hasil dan manfaat pelayanan.

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perpustakaan dan Kearsipan. Perkembangan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dari tahun ke tahun terus ditingkatkan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh terus berbenah memperbaiki sarana dan prasarana yang dibutuhkan demi perbaikan layanan yang diberikan kepada pengguna layanan baik di bidang perpustakaan maupun di bidang kearsipan.

Program kegiatan tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan layanan kepada pengunjung dengan memperhatikan layanan publik yang ramah dan responsif, terhadap pengguna layanan terutama kelompok disabilitas dan kaum *diffable*. Pengalokasian anggaran untuk peningkatan layanan perpustakaan terutama layanan perpustakaan di luar jam dinas, perpustakaan keliling dan operasional Mobil Sadar Arsip akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja Pelayanan Publik yang diberikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

2.2.1 JENIS LAYANAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Adapun Jenis Layanan Perpustakaan dan Kearsipan yang terdapat dalam Indikator Kinerja antara lain:

Layanan Bidang Perpustakaan

a. Layanan Sirkulasi

Pelayanan sirkulasi adalah pelayanan yang menyangkut peredaran bahan-bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan. Proses peminjaman bahan pustaka, penentuan jangka waktu peminjaman, pengembalian bahan pustaka yang dipinjam dan pembuatan statistik peminjaman dilakukan di layanan sirkulasi ini.

b. Layanan Referensi

Layanan referensi adalah kegiatan pelayanan perpustakaan untuk membantu pemakai perpustakaan menemukan informasi dengan cara menjawab pertanyaan dengan menggunakan koleksi referensi serta memberikan bimbingan untuk menemukan dan memakai koleksi referensi.

c. Layanan Penelusuran Literatur

Layanan ini biasanya pustakawan harus dapat membantu pengunjung mencari informasi dan literatur yang dibutuhkan dan diminta oleh pengguna.

d. Layanan Anak

Layanan memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pendayagunaan koleksi bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, ilmu pengetahuan, dan rekreasi, maka salah satu layanan yang diselenggarakan oleh perpustakaan umum adalah layanan anak atau juga dikenal dengan seksi anak-anak.

e. Layanan Remaja

Biasanya perpustakaan umum juga menyediakan layanan bagi anak remaja. Perbedaan antara layanan anak-anak dengan layanan remaja, setingkat lebih tinggi dalam menyediakan bahan pustaka yaitu yang sesuai dengan selera anak remaja.

f. Layanan Perpustakaan Keliling

Layanan perpustakaan keliling merupakan layanan ekstensi atau perluasan layanan dari perpustakaan umum yang digerakkan oleh petugas Perpustakaan. Penyelenggaraan perpustakaan keliling ini bertujuan untuk mendekatkan koleksi kepada pemakainya, sebab banyak pemakai yang tinggal jauh dari perpustakaan tidak berkesempatan mengunjungi perpustakaan. Padahal mereka juga membutuhkan layanan perpustakaan. Lokasi Layanan Perpustakaan Keliling seperti Sekolah yang jauh dari Perpustakaan Umum, tempat-tempat wisata dan keramaian lainnya.

g. Layanan Perpustakaan di Luar Jam Dinas

Layanan perpustakaan ini merupakan layanan perpustakaan di luar jam kerja seperti hari Sabtu-minggu dan malam hari tetapi karena minimnya anggaran

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan beberapa tahun terakhir layanan perpustakaan malam hari ditiadakan.

Layanan Bidang Kearsipan

a. Pelayanan Konsultasi Sumber Arsip

Petugas layanan arsip memberikan penjelasan tentang informasi yang dibutuhkan pencari informasi; Pencari informasi datang langsung ke lembaga kearsipan dapat membaca temu balik arsip (Daftar Pertelaan atau Daftar Inventaris Arsip).

b. Pelayanan Peminjaman Arsip

Petugas layanan arsip menyerahkan Daftar Pencarian Arsip untuk dibaca arsip mana yang akan dipinjam, setiap calon peminjam wajib mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh petugas arsip.

c. Pelayanan Penggandaan dan Reproduksi Arsip

Permintaan penggandaan reproduksi arsip dilakukan melalui permintaan tertulis dengan mengisi formulir penggandaan / reproduksi arsip atau koleksi lain untuk mendapatkan persetujuan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh selain berpedoman dan mengacu kepada RPA, RKPA dan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh juga menyelaraskan dengan kebijakan yang disusun oleh Instansi Pembina Pusat yaitu Perpustakaan Nasional RI dan Arsip Nasional RI, sehingga dalam Renja ini ada keselarasan dan sinergi antara Program pusat, Provinsi maupun dengan Kabupaten/ Kota.

Program dan Kegiatan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang disinergikan dengan Program Pengembangan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan Koleksi Perpustakaan
2. Pengelolaan Deposit Terbitan Nasional
3. Preservasi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno

4. Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi
5. Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca
6. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Perpustakaan
7. Pengembangan Perpustakaan
8. Pengembangan Pustakawan

Pelaksanaan Pembangunan di bidang Perpustakaan memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. Prioritas Perpustakaan untuk penguatan kelembagaan antara lain melalui :

1. Penguatan Kapasitas kelembagaan perpustakaan.
2. Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah
3. Penguatan Lembaga Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan.
4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama Pusat, Daerah, Masyarakat, Satuan Pendidikan dan Pihak Swasta dalam pembangunan perpustakaan.
5. Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial

Program Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh di bidang Kearsipan yang disinergikan dengan Lembaga Arsip Nasional (ANRI) antara lain sebagai berikut:

1. Mewujudkan Arsip sebagai indikator kinerja lembaga dan obyek pemeriksaan dalam rangka transparansi penyelenggaraan pemerintah melalui pemberdayaan potensi kearsipan K/ L di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat ;
2. Mewujudkan pengelolaan arsip aset melalui pengembangan aplikasi *electronic record system*;
3. Mewujudkan penyelamatan dan perlindungan arsip strategis dan melestarikannya melalui sistem seleksi makro strategis, sistem restorasi moderen, digitalisasi dan sistem jaringan informasi ;
4. Mengembangkan sistem akses dan layanan arsip melalui aplikasi sistem jaringan aplikasi kearsipan di lembaga Kearsipan daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Mewujudkan dan mengembangkan NSPK sebagai Alat Kontrol ANRI terhadap penyelenggaraan kearsipan.

6. Membangun sinergitas berkelanjutan dengan K/ L di Pusat dan Daerah terutama Organisasi Kearsipan (unit dan lembaga kearsipan) dan lembaga kearsipan internasional yang tergabung dan ICA dan Sarbica.

2.3.1 Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.

Permasalahan dan isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut:

1. Gedung Layanan Perpustakaan yang belum sepenuhnya selesai
2. Sarana dan prasarana arsip dan pustaka yang belum memadai.
3. Masih rendahnya minat baca masyarakat walaupun IPLM dan TGM Aceh naik dibandingkan tahun 2023 tetapi angka ini masih di bawah rata-rata Nasional.
4. Tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah/Lembaga Pendidikan/Perusahaan dan masyarakat terhadap kebijakan kearsipan belum berjalan optimal.
5. Kurangnya perhatian pimpinan di unit-unit pengolah terhadap pentingnya Fungsi arsip.
6. Kurangnya koordinasi pemerintah kab/kota untuk memfasilitasi penyelenggaraan Kearsipan dan Perpustakaan di daerah.
7. Kurangnya koleksi perpustakaan digital (*e-book*)
8. Masih rendahnya minat baca dan pemanfaatan arsip sebagai bahan penelitian.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengemban tugas membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional, dengan cara terus meningkatkan minat baca masyarakat, melalui upaya-upaya seperti melakukan kegiatan pameran dan roadshow perpustakaan dengan tujuan supaya mendekatkan buku dengan pembaca, lomba bercerita, hari kunjungan perpustakaan dan pemutaran film anak-anak.

Arsip merupakan Sumber Informasi dan Menjadi Pusat Ingatan serta bahan kajian dalam rangka pengambilan keputusan oleh seorang pimpinan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh melaksanakan kegiatan pembinaan / bimbingan teknis kearsipan guna meningkatkan kesadaran aparatur akan pentingnya arsip pada unit kerja / lembaga Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan

melaksanakan penyelamatan/mengamankan arsip sebagai sumber bahan-bahan bukti nyata bagi penyelenggaraan pemerintah, Pembangunan dan kehidupan kebangsaan pada umumnya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh terus meningkatkan Standar Pelayanan Minimal dengan memberikan layanan arsip semaksimal mungkin untuk seluruh lapisan masyarakat, melalui program-program Arsip digital melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).

2.3.2 Tantangan Dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Layanan Perpustakaan sebagai pusat pembelajaran merupakan wadah pengembangan ilmu pengetahuan dan kreativitas dengan mengedepankan kebutuhan informasi yang sangat diperlukan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan serta merupakan tempat rekreasi edukatif. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh terus berbenah dan melaksanakan penambahan koleksi bahan pustaka sesuai dengan permintaan pengunjung dan koleksi terkini. Akses dan fasilitas internet gratis serta pengembangan perpustakaan desa juga masif dilakukan. Upaya-upaya ini ditempuh sebagai salah satu jalan peningkatan IPLM dan TGM.

Perpustakaan harus sudah mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan globalisasi informasi agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sumber daya dan dapat memenuhi kebutuhan para pengguna/pemustaka. Untuk itu diperlukan pengembangan teknologi informasi dengan melakukan modernisasi pelayanan dan menerapkan teknologi informasi dalam aktivitas kesehariannya sehingga perpustakaan dapat memberikan yang terbaik melalui fasilitas teknologi informasi ini.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan pemahaman masyarakat terhadap informasi sebagai akibat dari globalisasi informasi, perpustakaan harus menyesuaikan diri dengan memberikan layanan yang bersifat aktif bahkan proaktif dengan menawarkan berbagai bentuk informasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Masyarakat selaku pengguna layanan perpustakaan juga menuntut perpustakaan seharusnya siap dengan kebutuhan informasi masyarakat dengan kecepatan layanan dan ketepatan informasi yang diberikan. Saat ini Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Aceh juga menggunakan aplikasi INLISLITE yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung perpustakaan untuk penelusuran informasi dan memudahkan temu koleksi yang dimiliki perpustakaan.

Perpustakaan juga harus memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk menghadapi tantangan yang akan terus dihadapi di masa mendatang terkait dengan informasi yang terus berkembang. Peluang-peluang yang ada meliputi:

1. Ketersediaan anggaran yang memadai;
2. Sarana dan prasarana yang representatif mengikuti perkembangan teknologi informasi komunikasi;
3. Adanya komitmen pimpinan;
4. Perkembangan informasi dan ilmu pengetahuan;
5. Kebijakan pemerintah di bidang perpustakaan;
6. Kerjasama dengan penerbit dan penulis;

2.3.3 Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi Dan Catatan Penting Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program Dan Kegiatan Prioritas Pada Tahun Yang Direncanakan.

Adapun isu strategis yang dapat diangkat dalam RENJA ini dan perlu disiapkan landasannya bagi pembangunan ke depan yaitu:

1. Penguatan terhadap infrastruktur perpustakaan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih dirasakan sangat kurang.
2. Kurangnya apresiasi Pemerintah Daerah terhadap keberadaan perpustakaan dan kearsipan karena rendahnya pemahaman akan pentingnya perpustakaan dan kearsipan.
3. Kondisi SDM baik dari segi kuantitas maupun kompetensi terutama terkait dengan keahlian di dalam penguasaan Teknologi Informasi Komunikasi yang masih sangat terbatas.
4. Rendahnya minat dan budaya baca masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA

Rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh telah disesuaikan dengan perencanaan kerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun 2023 – 2026 sebagai dasar pertimbangan untuk menyusun berbagai program dan kegiatan tahunan yang di jabarkan dalam rancangan dokumen Rencana Kerja Anggaran.

Rencana Kerja Tahunan memuat informasi tentang analisis kebutuhan program dan kegiatan dari hasil review terhadap rancangan awal RKPA yang terinci sesuai dengan Lokasi, Indikator Kinerja, Target dan Besaran Dana yang dibutuhkan. Program dan Kegiatan yang di usulkan merupakan representasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Identifikasi Program dan Kegiatan yang akan didanai melalui APBA disusun menurut objek Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah beserta Pendanaan Indikatif.

Penetapan pagu anggaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2026 yang diperuntukkan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp. 39.745.087.907,-. Alokasi anggaran ini akan digunakan untuk menjalankan urusan penyelenggaraan layanan publik di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Berdasarkan hal-hal yang digariskan dalam RKPA Tahun 2026, penyusunan program/pembangunan diarahkan kepada program prioritas pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan,telah menyesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang tersedia, juga melakukan upaya-upaya dengan pihak lainnya yang berpotensi dapat berkontribusi terhadap peningkatan anggaran serta penguatan pelayanan perpustakaan dan kearsipan, sehingga tercipta keselarasan dan sinergi dalam pencapaian sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) tahun 2026 dan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT ACEH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah:

1. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong Nilai Budaya Literasi
2. Meningkatnya minat baca masyarakat
3. Mewujudkan penyediaan perpustakaan keliling serta mengadakan perlombaan membaca (STRANAS)
4. Meningkatkan literasi dan budaya membaca melalui pelatihan, kompetensi dan advokasi budaya baca (arah kebijakan)

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh adalah untuk : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan derajat kesehatan sebagaimana yang tujuan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2024. Sasaran yang akan dicapai adalah : Meningkatnya minat baca masyarakat.

Pencapaian tujuan dan sasaran ini akan diwujudkan melalui strategi penyediaan perpustakaan keliling serta mengadakan perlombaan-perlombaan membaca.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh merencanakan akan melaksanakan 5 program 14 Kegiatan dan 41 sub kegiatan itu terbagi dua yang pertama kegiatan urusan rutin sebanyak 1 Program sedangkan kegiatan pilihan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebanyak 4 program dan 14 kegiatan.

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp. 542.460.413,-
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 185.421.201,-
- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 19.448.489.812,-
- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp. 113.428.710,-
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Rp. 52.870.700,-
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Rp. 57.254.116,-
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 90.172.087,-
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 2.808.997.681,-
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 343.720.000,-
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 116.693.125,-
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp. 71.703.600,-
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 168.317.000’-
- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 50.000.000,-
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 2.000.000.000’-
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 4.729.317.755,-
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp. 920.756.000,-
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya Rp. 400.000.000,-

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp. 495.600.000,-

2. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

• Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi

- Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Rp. 108.753.900,-
- Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi Rp. 468.707.820,-
- Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi Rp. 667.023.971,-
- Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Rp. 44.452.059,-
- Pembinaan Perpustakaan umum dan Khusus Tingkat Provinsi Rp. 298.975.250,-
- Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan Dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi Rp. 146.315.415,-
- Pengembangan Perpustakaan Deposit Rp. 438.321.200,-
- Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Rp. 142.190.060,-
- Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi Rp. 7.071.750,-

• Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi

- Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Rp. 669.010.988,-
- Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Rp. 7.333.921.513,-

- Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Rp. 309.418.220,-
- Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Rp. 235.278.337,-

3. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

- **Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**

- Penyusutan Arsip Dinamis Rp. 93.424.004,-
- Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis Rp. 113.691.636,-
- Pembinaan Kearsipan Kewenangan Provinsi Rp. 72.025.000,-
- Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan yang menjadi Kewenangan Provinsi Rp. 27.940.602,-

- **Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**

- Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Wawancara Sejarah Lisan Rp. 978.735.800,-
- Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis Rp. 120.353.453,-

- **Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**

- Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN Rp. 174.000.000,-

4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

- **Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi**

- Pemulihan dan Penyimpanan Arsip akibat Bencana Rp. 43.280.960,-

- **Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi**

- Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Rp. 69.310.300,-

5. PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP

- **Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi**
 - Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Rp. 113.966.500,-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh mengemban tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya

saing dengan memberdayakan Perpustakaan dan Kearsipan sebagai sumber informasi dan sarana pembangunan SDM yang islami dengan cara meningkatkan minat baca masyarakat serta membina dan mengembangkan minat/ budaya masyarakat untuk memberdayakan arsip yang tersedia sebagai sumber informasi dan bahan kajian.

Tahun 2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh merencanakan akan melaksanakan 5 program 14 Kegiatan dan 41 sub kegiatan itu terbagi tiga kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pembinaan Perpustakaan
3. Program Pengelolaan Arsip
4. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
5. Program Perizinan Penggunaan Arsip

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp.556.142.691,-
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 211.000.000,-

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 24.383.017.626

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp. 200.000.000,-
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Rp. 118.247.484,-
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Rp. 171.336.170,-

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp.84.237.537,-

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 4.665.586.256,-
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 299.062.959,-
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 150.000.000,-
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp.104.112.000,-
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 90.831.000,-

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 50.000.00,-
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp.1.850.000.000,-
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 5.590.370.000,-

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp.921.200.000,-
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya Rp.390.484.000,-
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp. 495.960.217,-

2. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi

- Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi Rp. 503.791.000,-
- Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Rp.831.325.858,-
 - Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi Rp. 264.000.009,-
 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Rp.98.737.572,-
 - Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi Rp.200.000.000,-

- Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah provinsi Rp. 125.045.850,-
- Pengembangan Perpustakaan Deposit Rp. 600.003.422,-
- Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Rp.3.100.006.666,-
- Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Rp. 49.412.850,-

Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi

- Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Rp.408.701.300,-
- Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Rp.10.645.863.145,-
- Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Rp.246.615.300,-
- Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Rp.197.314.000,-

3. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi

- Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi Rp. 119.681.000,-
- Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis Rp. 439.195.040,-
- Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi Rp. 154.607.534,-
- Akuisisi Arsip Statis Rp. 154.607.534,-

Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi

- Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN Rp.276.219.415,-

4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun

- Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Rp. 145.789.380,-

Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota

- Pendataan Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Propinsi Rp. 114.964.334,-
- Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kab/Kota Rp. 125.100.000,-

Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi

- Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Rp. 49.992.495,-

5. PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP

Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi

- Penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup Rp. 315.100.000,-

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2022-2026. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Renja ini selanjutnya kan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Rencana Kerja ini disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2010.

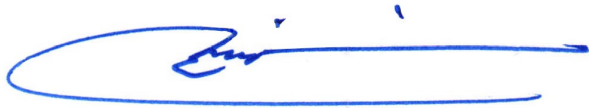
Renja ini juga akan digunakan dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBA maupun APBN dan mensinergikan Kegiatan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Renja juga akan digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Sesuai amanat Undang-Undang yang menyebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dasar/pedoman untuk menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tugas–tugas Pemerintahan Umum dengan prinsip transparan dan akuntabel. Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga

aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasyarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Banda Aceh, Februari 2025
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Dr. Edi Yandra, S.STP, MSP
Pembina Utama Madya
NIP 19751105 199612 1 002